

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andrew Heywood, *Politics*, Palgrave, New York, Second Edition, 2002.

Bambang Cipto, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.

Dahlan Thaib, *DPRD Sistem Ketatanegaran Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1994.

\_\_\_\_\_, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Josep Riwu Kihu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Lili Rassjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.

Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

\_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Nuri Evirayanti, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Sachran Basah, *Ilmu Negara, Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia (Kajian tentang Distribusi Kekuasaan antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca kembali berlakunya UUD 1945)* UII Press, Yogyakarta, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soetjipto Wirosarjono, *Dialog dengan Kekuasaan, Esai-Esai Tentang Agama, Negara, dan Rakyat*, Mizan, Bandung, 1995.

Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, PT. Rajawali, Jakarta, 1981.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915*), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064*), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282*), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811*), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310*), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

*(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801*).

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844*).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104*).

### **C. SUMBER LAIN**

*<http://www.theceli.com/index.php>*